



Buku Obor

EDISI REVISI

Hak Azasi Perempuan

**Instrumen Hukum untuk
Mewujudkan Keadilan
Gender**

Dengan Dukungan Kedutaan Besar Selandia Baru

Kelompok Kerja Convention Watch,
Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia

Daftar Isi

Daftar Isi	hlm. v-vii
Kata Pengantar	hlm. ix-xiii
Kata Pengantar Edisi Ketiga	hlm. xiv-xvii

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	hlm. 1-4
--	----------

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	hlm. 5-7
--	----------

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, Tanggal 24 Juli 1984 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the	
---	--

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	hlm. 8-34
Protokol Opsional (<i>Optional Protocol</i>) Terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	hlm. 35-46
Rekomendasi Umum No. 19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Sidang Ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	hlm. 47-61
Rekomendasi Umum No. 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga, Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Sessi Ketigabelas, 1994)	hlm. 62-86
Rekomendasi Umum No. 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik, Pasal 7 dan 8, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Sessi Keenambelas, 1997)	hlm. 87-113
Rekomendasi Umum No. 24 tentang Perempuan dan Kesehatan, Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Sessi Keduapuluh, 1999)	hlm. 114-132
Rekomendasi Umum No. 25 tentang Pasal 4 ayat 1, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tentang	

Tindakan-Khusus-Sementara (Sessi Keduapuluh, 1999)	hlm. 133-154
Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104)	hlm. 155-166
Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia	hlm. 167-213
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia	hlm. 214-245
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	hlm. 246-270
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	hlm. 271-286
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	hlm. 287-300
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang	

Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	hlm. 301-308
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangun- an Nasional	hlm. 309-312
Lampiran Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	hlm. 313-318